



TERUTAMA 30 PERSEN UNTUK PENANGANAN PANDEMI Dewan Soroti Penggunaan Dana Hibah Pariwisata

YOGYA (KR) - Dana hibah pariwisata sebesar Rp 33,18 miliar yang diperoleh Kota Yogya dinilai menjadi angin segar untuk membantu pemulihan sektor industri wisata. Kalangan dewan pun menyoroti penggunaan bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tersebut.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Yogya Antonius Fokki Ardiyanto, mengatakan dana hibah pariwisata peruntukannya sudah dijelaskan yakni 70 persen untuk industri hotel dan restoran, serta 30 persen untuk Pemkot. "Kalau yang 70 persen itu sudah cukup jelas peruntukannya. Itu akan terbagi habis bagi hotel dan restoran yang sesuai persyaratan untuk membantu operasional karena selama ini cukup terdampak pandemi. Tetapi yang 30 persen dikelola Pemkot ini perlu kami awasi," jelasnya, Minggu (15/11).

Sesuai arahan Kemenparekraf, 30 persen digunakan Pemkot dalam membantu penanganan dampak pandemi di

sektor pariwisata. Khususnya menunjang program CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environment. Yakni kebersihan, kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup dalam tempat-tempat wisata untuk memastikan keamanan wisatawan.

Fokki menilai, 30 persen dari Rp 33,18 miliar tidak bisa dinilai sepele karena mencapai sekitar Rp 9,9 miliar. "Bantuan itu kan sifatnya hibah sehingga penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai kaidah. Teman-teman di Komisi B menaruh perhatian agar nanti tidak menimbulkan persoalan," imbuhnya.

Salah satu pengawasannya ialah mengenai teknis penggunaan. Hal ini karena Pemkot juga sudah mengalokasikan anggaran belanja tambahan (ABT) atau biaya tak terduga untuk penanganan Covid-19. Anggaran itu meliputi tiga sektor yakni penanganan di aspek kesehatan, pencegahan di masyarakat serta pemulihan ekonomi. Khusus untuk pe-

mulihan ekonomi, mayoritas digulirkan di sektor pariwisata. "Jangan sampai itu nanti tumpang tindih dan menjadi tidak jelas, mana yang dialokasikan dari ABT dan mana yang dari dana hibah pariwisata," katanya.

Sementara Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kadri Renggono, mengaku dana hibah pariwisata yang dikelolanya menjadi satu kesatuan untuk penanganan dampak pandemi di sektor pariwisata. Dirinya memastikan tidak akan terjadi tumpang tindih karena alokasinya sudah dijabarkan sesuai peruntukan. Dana hibah itu juga masuk dalam alokasi ABT.

"Semua sudah kami atur. Kalau teknisnya cukup banyak. Ada yang pengadaan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata atau ekonomi kreatif. Penjabaran CHSE itu pun kami mengacu dari Peraturan Menteri Kesehatan. Tapi itu menjadi satu kesatuan dari anggaran penanganan Covid-19," jelasnya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005